

BAB IV

BENTUK DAN RESOLUSI PERLAWANAN PEDAGANG

PASAR IR. SOEKARNO PASCA REVITALISASI

4.1 Bentuk Perlawanan Pedagang Pasar Ir. Soekarno Pasca Revitalisasi

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan pelaksanaan suatu kebijakan seharusnya tidak hanya memandang tentang apa yang akan dikerjakan, tetapi juga harus mempertimbangkan apa dampak dari kebijakan tersebut. Adanya revitalisasi pasar, bukan hanya menimbulkan dampak yang menguntungkan, tetapi memungkinkan juga muncul dampak yang tidak menguntungkan, terutama bagi pedagang.

Berdasarkan hasil observasi, revitalisasi yang dilakukan di Pasar Ir. Soekarno telah berdampak positif. Dampak positif revitalisasi Pasar Ir. Soekarno dirasakan terutama terkait dengan kondisi fisik pasar. Perbaikan fisik pasar jelas terlihat pada model bangunan pasar yang menjadi lebih modern, serta luas karena pasar dibangun ulang menjadi dua lantai. Selain itu, fasilitas-fasilitas pendukung pasar juga ditambahkan. Kondisi membaiknya fisik Pasar Ir. Soekarno ini diungkapkan oleh Bapak Sri Yanto, selaku pedagang tas dan sepatu di lantai dua.

“...pasar jadi lebih gede terus bangunannya juga lebih bagus, bersih, kios juga lebih tertata.”¹⁰

Hal senada dengan pendapat Bapak Sri Yanto juga diungkapkan oleh Bapak Wiwit selaku Ketua Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Ir. Soekarno

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sri Yanto, Senin, 26 Januari 2018 Pukul 10.15 WIB

“Sudah baik, seperti dilihat sekarang pasar kan jadi lebih rapi tertata dengan baik, terus lebih bagus juga bangunannya.”¹²

Bapak Wiwit mengungkapkan bahwa pasca revitalisasi, bangunan Pasar Ir. Soekarno menjadi lebih besar. Selain itu pasar menjadi lebih rapi, hal ini dikarenakan pasca revitalisasi penataan kios di Pasar Ir. Soekarno menjadi lebih baik dengan adanya sistem baru dalam penataan kios dan los.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pasca revitalisasi Pasar Ir. Soekarno selain menimbulkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif, khususnya bagi pedagang. Revitalisasi pasar yang justru menimbulkan dampak negatif jelas akan menimbulkan keresahan tersendiri bagi pihak yang dirugikan. Bermula dari keresahan-keresahan pihak yang dirugikan ini menjadi awal mula terjadinya konflik pasca revitalisasi. Konflik yang terjadi pasca revitalisasi di Pasar Ir. Soekarno berupa perlawanan yang dilakukan oleh pedagang.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, dalam perjanjian awal antara pemerintah dengan pedagang sebelum dilaksanakan proyek revitalisasi Pasar Ir. Soekarno, pedagang setuju untuk kembali menempati kios dan los yang telah disediakan serta diatur pembagiannya oleh pemerintah. Akan tetapi, yang terjadi justru pedagang menolak menempati kios dan los yang telah disediakan, namun justru memilih berdagang pada sepanjang trotoar serta menyewa lahan di luar pasar pemukiman warga sekitar pasar sepanjang Jalan Lettu Ismail. Melihat banyaknya pedagang liar di sepanjang trotoar serta Jalan Lettu Ismail, kemudian muncul suatu protes dari masyarakat. Adapun protes

¹² Hasil wawancara dengan Ketua HPP Pasar Ir. Soekarno, Senin, 26 Januari 2018 Pukul 11.00 WIB

masyarakat tersebut berupa memasang sebuah spanduk yang berisikan sindiran terhadap Bupati Sukoharjo. Adapun spanduk tersebut bertuliskan “*Pak Bupati piye perasaanmu Pasar Ir. Soekarno wes dadi apik malah do dodol neng trotoar*”, yang maknanya adalah sindiran terhadap bagaimana tanggapan Bupati Sukoharjo terkait revitalisasi Pasar ir. Soekarno yang telah usai akan tetapi masih banyak pedagang yang berjualan di area trotoar.

Gambar 4.1

Spanduk Protes Pedagang Terhadap Pedagang Liar



Sumber: <http://old.solopos.com/2016/03/11/pasar-ir-soekarno-pedagang-berjualan-di-luar-pasar-bupati-disentil-lewat-spanduk-699881>

Perlawanan atau resistensi yang dilakukan oleh pedagang Pasar Ir. Soekarno ini dapat digolongkan dalam jenis resistensi tertutup atau simbolis atau ideologis. Dikatakan resistensi tertutup karena pedagang Pasar Ir. Soekarno melakukan perlawanan dengan cara mengosongkan atau menolak menempati kios dan los yang telah disediakan oleh Pemerintah.

“...masih banyak kios dan los yang dikosongkan para pedagang. Apalagi yang letaknya didalam pasar, terutama los itu sepi banget. Pedagang lebih memilih menyewa kios di luar pasar.”⁸

⁸ Hasil wawancara dengan Lurah Pasar Ir. Soekarno, Rabu, 21 Januari 2018 Pukul 09.00 WIB

Bapak Tri Sukrisno memaparkan bahwa setelah dilakukan pembagian kios dan los pasca revitalisasi pasar Ir. Soekarno, pedagang pasar justru banyak yang mengosongkan kios dan losnya, sehingga kondisi di dalam pasar sepi pedagang. Bapak Tri Sukrisno menambahkan kios yang tutup paling banyak berada di area dalam pasar, adapun lokasi tersebut jauh dari pintu masuk pasar sehingga jarang dilewati pembeli.

Gambar 4.2

Kios Kosong Pasar Ir. Soekarno Sukoharjo (Lantai 1)



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2018

Gambar 4.3

Kios Kosong Pasar Ir. Soekarno Sukoharjo (Lantai 2)



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2018

Adapun sebagian besar kios dan los yang tutup merupakan kios serta los yang status kepemilikannya sudah perseorangan, atau dapat diartikan bahwa kios tersebut sudah dibayar lunas pasca revitalisasi oleh pemiliknya, yakni pedagang.

Pasca revitalisasi Pasar Ir. Soekarno kondisi area los justru lebih parah dibandingkan area kios,. Hal ini dikarenakan sangat sedikitnya pedagang yang membuka los mereka. Berbeda dengan letak kios kosong yang berada jauh dari pintu masuk, letak area los pasar justru berada didekat semua area pintu masuk. Walaupun demikian, kondisi los di pasar Ir. Soekarno tetap masih banyak yang kosong, bahkan pedagang yang bertahan untuk berjualan di los yang dimiliki dapat dihitung dengan jari.

Gambar 4.4

Los Kosong Pasar Ir. Soekarno Sukoharjo



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2018

Berbeda dengan kondisi di dalam pasar Ir. Soekarno yang sepi penjual, kondisi terbalik justru ditemukan di area luar pasar. Di luar area pasar Ir. Soekarno (sepanjang jalan samping pasar sampai dengan jalan belakang pasar) justru ditemukan para pedagang yang ramai menjajakan barang dagangannya.

Gambar 3.4

Kios dan Oprokan Luar Pasar Ir. Soekarno Sukoharjo



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2018

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pedagang yang memiliki kios di dalam pasar, lebih memilih mengosongkan kios dan los di pasar namun justru memilih menyewa kios di luar pasar. Para pedagang mengungkapkan beranggapan bahwa berjualan di luar pasar dengan menyewa lahan penduduk dengan harga sewa tinggi, lebih menguntungkan dibanding tetap bertahan di dalam pasar dengan kios dan los milik sendiri tetapi dengan kondisi sepi

pengunjung. Adapun, hal ini didukung hasil wawancara dengan Lurah Pasar Ir. Soekarno, Bapak Tri Sukrisno

“...dengan ngontrak diluar pasar, pembeli lebih ramai, walaupun harga sewanya juga lebih mahal.”⁸

Bapak Tri Sukrisno juga membenarkan bahwa menurut pedagang pembeli justru lebih ramai di luar area pasar baik di sepanjang Jalan Lettu Ismail maupun sepanjang trotoar. Walaupun harga sewa kios maupun lahan di area penduduk sekitar pasar Ir. Soekarno jauh lebih mahal daripada harga sewa kios dan los didalam pasar, dengan keuntungan pedagang yang lebih besar di luar pasar, laba bersih mereka masih jauh lebih besar jika berjualan di luar pasar.

4.2 Analisis Resolusi Konflik (Perlawanan) Pedagang Pasar Ir. Soekarno

Pasca Revitalisasi

Zubir (2002) dalam pandangannya terkait perlawanan kaum pinggiran, menyatakan bahwa perlawanan yang dilakukan seperti oleh buruh, pedagang, petani, dan lain-lain) bersifat tidak terarah. Karena sifat perlawanan yang tidak terarah, dalam dunia politik, perlawanan sejenis ini akan mudah menjadi target adu domba dari berbagai kelompok yang memiliki kepentingan lain.

Berdasarkan hasil observasi di lingkungan Pasar Ir. Soekarno yang telah dibahas pada sub bab bentuk perlawanan pedagang, dapat disimpulkan bahwa perlawanan yang dilakukan Pasar Ir. Soekarno pedagang memang terlihat tidak terarah. Dengan kondisi demikian dikhawatirkan perlawanan yang dilakukan pedagang Pasar Ir. Soekarno ini menjadi target politik kepentingan kelompok

⁸ Hasil wawancara dengan Lurah Pasar Ir. Soekarno, Rabu, 21 Januari 2018 Pukul 09.00 WIB

tertentu. Walaupun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan empat responden pedagang, mereka mengungkapkan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh pedagang pasar semata hanya karena kondisi pasar yang sepi.

“... mereka (pedagang) yang keluar ya karena keinginannya sendiri, karena banyak juga yang tetep milih dipasar walaupun lebih banyak juga kios yang kosong.”¹²

Perlawan yang dilakukan pedagang Pasar Ir. Soekarno yang dilakukan dengan cara mengosongkan kios dan los merupakan keinginan pribadi para pedagang, karena menurut beliau jika dilihat masih ada juga pedagang yang tetep bertahan berjualan di dalam pasar. Adapun pendapat Bapak Wiwit tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Santosa Budi Utomo S. Sos selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sukoharjo

“Tidak ada pemicu lain, hal ini semata karena tuntutan kebutuhan ekonomi para pedagang itu sendiri ditambah perasaan kurang puas dari pedagang.”⁷

Bapak Budi mengungkapkan bahwa tidak ada pemicu lain diluar tuntutan kebutuhan ekonomi pedagang, yang ditambah dengan perasaan kurang puas dari pedagang terkait dengan lokasi kios dan kondisi pasar yang masih sepi.

Perlawanan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Ir. Soekarno sudah semestinya mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo khususnya dinas terkait, yakni Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM. Hal ini dikarenakan bukan tidak mungkin apabila sepiya kondisi pasar dibiarkan terus menerus maka Pasar Ir. Soekarno akan mati, yakni dalam artian tidak beroperasi lagi. Adapun upaya

¹² Hasil wawancara dengan Ketua HPP Pasar Ir. Soekarno, Senin, 26 Januari 2018 Pukul 11.00 WIB

⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelola Pasar Disdagkop UKM Kabupaten Sukoharjo, Bapak Santosa Budi Utomo S. Sos pada hari Rabu, 21 Januari 2018 pukul 13.15 WIB

mediasi memerlukan proses yang lama. Jika dilihat lebih mendalam terjadinya perlawanan pedagang yang terjadi di Pasar Ir. Soekarno didukung dengan pihak-pihak yang terlibat konflik memiliki tingkat kepercayaan satu sama lain yang rendah (Wirawan, 2009: 207-211). Dalam rangka menyelesaikan konflik diperlukan proses mediasi sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kebutuhan intervensi, dalam hal ini mediator perlu memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kebutuhan intervensi yang sama besarnya. Selain itu, perlu juga identifikasi terhadap ada tidaknya pihak lain dibelakang pihak yang berkonflik, jika ada perlu persetujuan untuk dilakukan mediasi.
2. Pemetaan konflik, yakni pengumpulan informasi mengenai konflik yang akan diintervensi. Informasi tersebut meliputi identifikasi pihak-pihak yang terlibat konflik dan analisis penyebab konflik
3. Menyusun desain intervensi atau rencana intervensi
4. Melakukan dengar pendapat, disini mediator memanggil pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mendengarkan pendapat masing-masing
5. Mengembangkan iklim konflik yang kondusif
6. Transformasi elemen konflik
7. Merumuskan alternatif keputusan bersama
8. Memilih satu alternatif keputusan bersama
9. Melaksanakan kesepakatan.

Berdasarkan hasil observasi pada lingkungan Pasar Ir. Soekarno serta hasil wawancara dengan pihak Disdagkop UKM, sudah dilakukan upaya resolusi

terhadap kasus kosongnya kios dan los di Pasar Ir. Soekarno. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Santosa Budi Utomo S. Sos selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sukoharjo

“...dari pihak Pemerintah khususnya Dinas sudah sering melakukan sosialisasi (mediasi) agar pedagang ini mau masuk pasar. Peringatan-peringatan juga sudah diberikan.”⁷

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM sudah sering melakukan kegiatan sosialisasi kepada pedagang dalam rangka mediasi. Dalam kegiatan mediasi tersebut Disperindag UKM Kabupaten Sukoharjo mengumpulkan pedagang Pasar Ir. Soekarno, dalam pertemuan tersebut Disperindag UKM menginstruksikan agar para pedagang meninggalkan kios yang mereka sewa di luar pasar, kemudian para pedagang diminta untuk kembali menempati kios dan los yang sudah disediakan di dalam Pasar Ir. Soekarno. Selain itu, Disdagkop UKM juga sudah memberikan surat peringatan kepada pedagang. Adapun dalam surat peringatan tersebut berisi larangan kepada pedagang yang berjualan di luar area pasar. Akan tetapi, surat peringatan tersebut seakan hanya menjadi angin lalu bagi para pedagang. Mereka cenderung tidak menghiraukan peringatan tersebut walaupun sudah tiga kali surat peringatan diturunkan. Adapun hal ini sesuai informasi dari Lurah Pasar Ir. Soekarno, Bapak Tri Sukrisno

“Sudah banyak tanggapan. Kita tiap hari ngoprak-oprak (menertibkan) meminta pedagang masuk. Tapi pedagang pada nggak mau. Sudah ada surat peringatan juga, peringatan 1, 2, 3, tapi tetep pada nggak mau masuk. Ketika diberi surat peringatan agar masuk, pedagang sudah masuk semua, tapi pasar masih sepi. Mereka merasa lebih enak diluar, pembeli banyak, sehingga

⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelola Pasar Disdagkop UKM Kabupaten Sukoharjo, Bapak Santosa Budi Utomo S. Sos pada hari Rabu, 21 Januari 2018 pukul 13.15 WIB

pedagang keluar lagi. Tapi, pedagang yang di trotoar jam 8 pagi udah bersih, tapi justru pindah di area penduduk.”⁸

Melihat dari hasil wawancara, para pedagang sebenarnya sudah mau menempati kembali kios dan los yang disediakan di dalam pasar ketika surat peringatan diturunkan. Akan tetapi, setelah menempati kios dan los di dalam pasar, para pedagang mengeluhkan kondisi pasar yang masih sepi pembeli. Di sisi lain, pedagang mengungkapkan bahwa jika berdagang di luar pasar pendapatan mereka akan jauh lebih banyak. Hal ini memicu para pedagang untuk kembali berdagang di luar pasar walaupun harus membayar sewa lahan berdagang di pemukiman penduduk sekitar pasar. Kondisi demikian terjadi berulang-ulang setiap kali surat peringatan dari Pemerintah diturunkan. Senada dengan hasil wawancara dengan Bapak Tri Sukrisno selaku Lurah Pasar Ir. Soekarno, pedagang juga membenarkan jika memang sudah ada surat peringatan dari pemerintah untuk pedagang yang berjualan di luar area pasar serta warga sekitar pasar yang menyewakan tempat berjualan.

“Pedagang yang diluar itu sudah diberi surat peringatan sama Pemerintah, terus yang warga sekitar pasar yang menyewakan kios itu juga sudah diperingati. Penertiban Satpol PP juga sudah pernah ada. Ya, tapi pedagang masih ngeyel nekat balik lagi keluar. Bagaiimana lagi di dalam pasar juga sepi.”¹⁰

Walaupun sudah ada surat peringatan pedagang tetap masih nekat berjualan di luar pasar dengan dalih kondisi pasar yang sepi. Pelibatan aktor-aktor lain dalam upaya resolusi konflik diperlukan dalam menangani masalah perlawanan pedagang yang terjadi di Pasar Ir. Soekarno. Resolusi konflik ini perlu melibatkan aktor lain seperti ketua RT, ketua RW serta Lurah, mereka selaku struktur

⁸ Hasil wawancara dengan Lurah Pasar Ir. Soekarno, Rabu, 21 Januari 2018 Pukul 09.00 WIB

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sri Yanto, Senin, 26 Januari 2018 Pukul 10.15 WIB

pemerintahan kecil yang berada di daerah Pasar Ir. Soelarno diharapkan dapat membantu menangani masalah khususnya dari sisi masyarakat yang menyewakan rumah atau lahannya untuk tempat berjualan bagi pedagang di luar pasar. Sehingga diharapkan pedagang agar masuk ke dalam pasar serta pemukiman sekitar area pasar menjadi steril pedagang. Adanya peringatan sudah seharusnya juga didukung oleh aktor penegak ketertiban, dalam kasus ini adalah Satpol PP guna mendukung penertiban pedagang itu sendiri.

Selain dengan surat peringatan, Pemerintah juga sudah melakukan tindakan dengan membatasi mobilitas di luar area pasar, khususnya pada Jalan Lettu Ismail (sebelah selatan Pasar Ir. Soekarno). Pembatasan ini dilakukan dengan cara memberikan aturan satu arah, yakni dari arah timur ke utara pada gang tersebut. Adanya aturan satu arah ini dilakukan dengan harapan agar mobilitas pembeli di luar area pasar, khususnya pada gang tersebut akan berkurang. Dengan menurunnya mobilitas pembeli, maka otomatis pendapatan pedagang akan berkurang sementara harga sewa di tempat tersebut tinggi. Harapan selanjutnya pedagang yang berjualan di area tersebut akan sukarela mau menempati kembali kios dan los yang telah disediakan di dalam pasar dengan harga sewa yang jauh lebih murah, bahkan sudah dimiliki sendiri oleh pedagang.

Gambar 4.1
*Plang Larangan Lewat (Satu Arah) di Jalan Lettu Ismail
(Selatan Pasar Ir. Soekarno)*



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2018

Walaupun sudah diberi plang larangan sedemikian rupa, berdasarkan hasil pengamatan masih banyak ditemukan pengendara yang nekat menerobos jalan ini, khususnya kendaraan roda dua. Tetapi, kondisi demikian sudah jauh lebih baik jika dibandingkan sebelum adanya pengaturan satu arah. Sebelum diberlakukan aturan satu arah, pada jalan tersebut seringkali terjadi kemacetan yang dikarenakan pembeli yang berbelanja di lokasi tersebut..

Upaya yang telah dilakukan oleh Disdagkop UKM Kabupaten Sukoharjo dalam menangani masalah ini dapat dikatakan belum berhasil. Sejauh ini Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sukoharjo sedang mengupayakan agar pedagang yang sudah memiliki kios dan los agar mau menempati kios dan los yang sudah dimiliki di dalam pasar. Di sisi lain, untuk pedagang yang belum memiliki kios maupun los sedang dilakukan pendataan berapa banyak jumlah pedagang tersebut. Hal ini selaras dengan informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan Bapak Santosa Budi Utomo, S.Sos selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sukoharjo

“Sejauh ini upaya yang sedang dilakukan adalah terkait pendataan sendiri mengenai jumlah pedagang di luar pasar sendiri. Kita masih proses menghitung apakah kalau pedagang diluar itu dimasukkan semua, pasar bisa menampung atau tidak. Soalnya dari pengamatan itu jumlah pedagang diluar itu tidak sebanding dengan jumlah kios dan los.”⁷

Bapak Budi mengungkapkan bahwa berdasarkan pandangan sekilas jumlah pedagang yang berjualan di luar pasar Ir. Soekarno tidak sebanding dengan jumlah kios dan los yang tersedia di dalam pasar. Oleh karena itu sejauh ini masih dilakukan pendataan jumlah pedagang tersebut. Di sisi lain, Disdagkop UKM Kabupaten Sukoharjo juga masih merumuskan langkah lain yang tepat dalam menangani masalah penataan pedagang di Pasar Ir. Soekarno.

Solusi yang efektif dalam menangani penataan pedagang di Pasar Ir. Soekarno sampai saat ini memang belum ditemukan, akan tetapi disisi lain Disdagkop tetap berusaha meminimalisir masalah penataan pedagang ini, khususnya terkait dengan masalah sepiunya pengunjung pasar. Guna meminimalisir masalah sepiunya pengunjung Pasar Ir. Soekarno, langkah kedepan yang akan direalisasikan oleh Disdagkop Ukm adalah pada upaya meningkatkan promosi pasar. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pasar Disdagkop UKM Kabupaten Sukoharjo

“Untuk rencana kedepan, kami mengagendakan peningkatan promosi Pasar Ir Soekarno kepada konsumen. Kita ingin mengadakan semacam acara expo yang memuat barang dagangan pasar. Adapun dalam acara tersebut kita juga menawarkan semacam diskon. Tetapi sejauh ini kita masih mencari distributor yang cocok, serta *event organizer*.”

⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelola Pasar Disdagkop UKM Kabupaten Sukoharjo, Bapak Santosa Budi Utomo S. Sos pada hari Rabu, 21 Januari 2018 pukul 13.15 WIB

Promosi terhadap pasar tradisional, khususnya Pasar Ir. Soekarno perlu dilakukan guna meningkatkan minat konsumen untuk berbelanja ke dalam pasar. Dengan meningkatnya konsumen yang masuk ke dalam pasar, diharapkan pula akan dapat memicu pedagang untuk kembali menempati kios maupun los yang telah disediakan. Upaya peningkatan promosi pasar Ir. Soekarno masih dalam tahap perencanaan, yakni dalam proses menentukan *event organizer* serta pihak-pihak yang nantinya akan bekerjasama dalam agenda promosi pasar, yakni seperti distributor barang.

Sejauh ini upaya resolusi yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sukoharjo terkait masalah penataan pedagang di Pasar Ir. Soekarno cenderung belum memberikan perubahan yang signifikan. Hal ini dikarenakan antar pihak-pihak yang berkonflik yakni pedagang, pemerintah, serta pembeli belum ditemukan titik terang penyelesaian konflik tersebut. Upaya resolusi yang dilakukan selama ini cenderung hanya berdasarkan kehendak dari Pemerintah saja, di sisi lain aktor-aktor lain belum diikutsertakan keterlibatannya dalam resolusi konflik. Dengan demikian implementasi dari resolusi tersebut kurang fokus pada titik akar permasalahan. Sebagai subjek utama dalam permasalahan di Pasar Ir. Soekarno, maka saran dari pedagang sangat diperlukan oleh Pemerintah guna merumuskan kebijakan yang paling tepat, sehingga diharapkan permasalahan ini akan terselesaikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan empat responden pedagang pasar Ir. Soekarno, dapat diambil kesimpulan atas saran dari pedagang serta pembeli guna mengatasi masalah penataan pedagang Ir. Soekarno.

1. Jam buka pasar dimajukan, sehingga pedagang pasar malam dapat masuk ke dalam pasar

Pedagang pasar Ir. Soekarno banyak mengeluhkan jam buka pasar yang menjadi lebih siang pasca revitalisasi. Jam buka pasar yang dimulai pukul 05.00 pagi dianggap terlalu siang bagi beberapa pedagang, khususnya pedagang sayuran. Hal ini menjadi pemicu pedagang untuk memilih berjualan di luar pasar dari tengah malam sampai pagi hari, atau yang seringkali disebut dengan pasar malam. Guna mengatasi adanya pasar malam yang berimbas pada kondisi pasar yang sepi, maka beberapa pedagang menyarankan supaya jam buka pasar dimajukan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Sri Yanto, selaku pedagang tas sepatu

“Ya kalau saran dari saya sebaiknya pasar malam (yang jualan malam), seperti jualan sayur itu.. Nah itu dimasukkan semua ke dalam pasar. Kalau pedagang malam bisa dimasukkan kan pembeli otomatis masuk, jadi pasar istilahnya akan lebih hidup, nggak banyak kios kosong. Tapi kalau dimasukkan semua pedagang itu juga sebenarnya tidak muat, soalnya kalau malem itu pedagangnya lebih banyak.”¹⁰

Bapak Sri Yanto menambahkan kendala jika pedagang pasar malam dimasukkan ke dalam pasar adalah pada jumlah kios dan los yang tersedia. Berdasarkan pengamatan beliau jumlah kios dan los yang tersedia di Pasar Ir. Soekarno tidak sebanding dengan jumlah pedagang pada pasar malam. Senada dengan saran dari bapak Sri Yanto, Ibu Umi selaku pedagang

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sri Yanto, Senin, 26 Januari 2018 Pukul 10.15 WIB

kelontong juga menyarankan agar jam buka pasar diubah agar menjadi lebih pagi

“Kalau bisa pasar malam itu dimasukkan saja, jadi pasar bukanya lebih pagi. Jadi didalem pasar itu diisi nggak kosong seperti ini. Tapi katanya tenaga keamanannya nggak kuat, takutnya itu nanti ada pencurian.”⁹

Ibu Umi menambahkan bahwa ada info jika jam buka pasar dibuat lebih pagi aparat keamanan yang tersedia di Pasar Ir. Soekarno kurang memadai. Beliau menambahkan kurangnya aparat keamanan yang tersedia dikhawatirkan akan ada kasus pencurian.

2. Pedagang *oprokan* diperbolehkan berjualan di dalam pasar

Salah satu kekurangan dari revitalisasi fisik Pasar Ir. Soekarno adalah tidak tersedianya area khusus untuk pedagang *oprokan*. Disisi lain, para pedagang Pasar Ir. Soekarno beranggapan bahwa pedagang *oprokan* sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi pasar. Sementara itu, pasca revitalisasi kehadiran pedagang *oprokan* justru dilarang masuk ke dalam pasar. Hal ini sesuai dengan informasi dari Ibu Jinem selaku pedagang makanan ringan

“*Oprokan* juga sebenarnya dibolehkan saja jualan, sekarang kan *oprokan* ngga boleh, padahal *oprokan* itu justru yang buat pasar jadi ramai.”¹¹

Menurut pedagang larangan terhadap pedagang *oprokan* menjadi salah satu pemicu sepiunya pasar Ir. Soekarno. Oleh karena itu, pedagang pasar menyarankan bahwa larangan terhadap pedagang *oprokan* lebih baik ditiadakan, sehingga pedagang tersebut akan berdagang di dalam area

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Umi pada Rabu, 21 Januari 2018 Pukul 09.00 WIB

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Jinem, Senin, 26 Januari 2018 Pukul 13.30 WIB

pasar. Dengan demikian para pedagang mengharapkan kondisi di dalam pasar setidaknya akan lebih ramai. Selain dari sisi pedagang, pembeli Pasar Ir. Soekarno juga menginginkan hal yang sama, yakni agar pedagang *oprokan* diperbolehkan saja agar berjualan di area kosong di dalam pasar

“...pedagang *oprokan* itu dibolehkan saja berjualan di pasar, soalnya katanya pedagang *oprokan* itu kan ga boleh jualan di pasar, padahal jumlah pedagang *oprokan* itu nggak sedikit lho.”¹³

Pedagang juga menyarankan langkah selanjutnya setelah pedagang diperbolehkan masuk adalah Pemerintah jangan terburu-buru untuk menarik biaya sewa maupun biaya ganti balik nama.

“...perlu adanya penataan terhadap pedagang-pedagang *oprokan*. Jika kios dan los tidak memadai, pedagang *oprokan* juga diperbolehkan berjualan di area pasar, serti di emperan tetapi tetap ditarik biaya retribusi. Tapi kalau seandainya pedagang *oprokan* yang berjualan diluar bisa dimasukkan semua, mungkin dari Pemerintah sendiri untuk pedagang yang belum membayar biaya balik nama angsuran sepuluh kali itu, jangan langsung meminta dibayar angsurannya. Mereka pasti mikirnya dagangan aja belum laku, tetapi sudah ditagih membayar. Karena bisa jadi pemicu mereka nekat keluar lagi.”¹²

Pedagang menyarankan untuk pedagang *oprokan* yang belum memiliki kios dan los tetap diperbolehkan untuk berjualan di area pasar.dengan syarat tetap ditarik biaya retribusi. Sedangkan jika kios maupun los yang terdapat di dalam pasar memadai, Bapak Wiwit memberikan saran kepada Pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam menarik biaya sewa maupun angsuran kepemilikan. Sehingga pedagang akan sedikit teringankan, apalagi dengan kondisi pasar sepi yang akan terjadi diawal masuk pasar.

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Juminem, Pembeli du Pasar Ir. Soekarno, Sabtu, 30 Juni 2018 Pukul 10.15 WIB

¹² Hasil wawancara dengan Ketua HPP Pasar Ir. Soekarno, Senin, 26 Januari 2018 Pukul 11.00 WIB

3. Peninjauan ulang penataan jumlah pasar modern serta area persebarannya

Salah satu penyebab sepiunya pasar Ir. Soekarno, adalah karena kehadiran beberapa toko modern di sekitar pasar. Pedagang mengeluhkan kehadiran pasar modern sangat besar imbasnya terhadap pendapatan pedagang di dalam pasar. Mengingat dalam perda Kabupaten Sukoharjo nomor 3 tahun 2011 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana disebutkan bahwa jarak terdekat antara pasar modern dan pasar tradisional adalah 1000 meter. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan ditemukan adanya toko modern yang letaknya di depan persis pasar Ir. Soekarno. Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara pedagang menyarankan agar kehadiran toko modern di sekitar pasar Ir. Soekarno tersebut perlu dikaji ulang. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Sumbarwoko Tri Widiyantoro selaku Ketua Himpunan Pedagang Pasar Ir. Soekarno

“Perlu ditingkatkan dari eksternal, terutama terkait penataan jumlah serta lokasi pasar modern seperti minimarket dan supermarket.”¹²

Selain fokus memperbaiki masalah di dalam pasar, diperlukan juga upaya dari eksternal pasar, yakni terkait dengan penataan toko modern di sekitar area Pasar Ir. Soekarno. Dengan adanya penataan terhadap toko modern di sekitar area pasar diharapkan eksistensi pasar tradisional akan tetap terjaga. Pelunya penataan pasar *swalayan* juga dikatakan oleh pembeli.

¹² Hasil wawancara dengan Ketua HPP Pasar Ir. Soekarno, Senin, 26 Januari 2018 Pukul 11.00 WIB

Mereka mengungkapkan jika keberadaan pasar swalayan mempengaruhi minatnya dalam berbelanja di pasar tradisional. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan salah satu pembeli di Pasar Ir. Soekarno

“...swalayan juga perlu ditata, soalnya kalo sebagai pembeli saya juga lebih milih belanja di swalayan kalo sembako, soalnya harganya juga ga berbeda jauh, tapi kualitas yang lebih baik.”¹⁴

Jika keberadaan swalayan berada di dekat area pasar, khususnya di Pasar Ir. Soekarno hal ini jelas mempengaruhi daya jual pasar Ir. Soekarno sendiri. Adanya swalayan ini jelas mempengaruhi pendapatan pedagang di dalam pasar. Hal ini dikarenakan pembeli lebih memilih berbelanja di swalayan dikarenakan harga pasar tradisional dan swalayan yang tidak terpaut jauh serta kualitas yang cenderung lebih baik.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Sunarni, pembeli di Pasar ir. Soekarno, Sabtu, 30 Juni 2018 Pukul 09.15 WIB